

SKRIPSI

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM
SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG”**



DISUSUN OLEH:

AMIRUL MUK'MIN

E051 191 025

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM
SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh:

AMIRUL MUK'MIN

E051 191 025

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.M.Si
NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui
Ketua Departemen
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM
SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

AMIRUL MUK'MIN

E051 191 025







Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 14 Februari 2023

Menyetujui

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()
Sekretaris : Saharuddin, S.IP, M.Si ()
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()
Anggota : Rahmatullah, S.IP, M.Si ()
Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si ()
Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirul Muk'min
Nim : E051191025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Sektor
Pertanian Dan Peternakan Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Februari 2023

Yang Menyatakan



AMIRUL MUK'MIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Sektor Pertanian dan Peternakan Di Kabupaten Sidenreng Rappang”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan berbagai dinamika yang dihadapi, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak dapat dipungkiri, tantangan serta hambatan juga menjadi kawan dalam proses selama penyusunan skripsi ini. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini namun menjadi lebih usaha, niat serta tekad yang kuat dalam waktu penyelesaiannya. Dukungan serta doa dari berbagai pihak menjadi penyemangat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga pada masa penyelesaian studi di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini izinkan juga penulis memberikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Muin dan Hj. Marlina Ishak yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis sehingga dapat tumbuh dan berkembang seperti saat ini.

Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada kedua orang tua penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Dr. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan banyak ilmu baru dalam kepenulisan ilmiah sedari awal hingga penyelesaian skripsi ini;
4. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M,Si selaku Pembimbing II dan sekaligus Penasehat Akademik yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak proposal hingga penyelesaian skripsi ini;

5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, AsharPrawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
7. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Bapak Mursalim Mile S.IP yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
8. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara;
9. Terima kasih untuk saudara kandung penulis Adik Ahmad Haedar Muin selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis dalam meraih segala mimpi dan cita-cita. Semoga kita semua dapat menjadi saudara yang dapat selalu membahagiakan kedua orang tua dunia akhirat.
10. Terima kasih untuk kakek dan nenek penulis (Alm) H. Abbas Saleh dan

(Alm) Hj. Nurhayati Abbas, keluarga besar penulis Hj. Asmiati Abbas, Ir. H. Ahmad Yani, Ir. Asri Sugiarto Abbas, Nurul Mufidah, Nurul Mutmainnah, Nurul Magfirah dan Adinda Nurul Mukhlysa yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.

11. Terima kasih untuk saudara – saudara NML, mulai dari Syukur, Pallang, Abil, Darul, Illank, Kiki, Fadly, Bang Ade, Yasmin, Surya, Ambas, Cikke, Andi Adi, Fajri, Ridho, Fajar, Cikke, Fikram, Rifqi, Safran, Zakkir, Bang Caddo, Akbar, Aan, Putra dan Raihan yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.

12. Terima kasih untuk teman – teman Posko 5 KKNT Kopi Kahayya Bulukumba gelombang 108 Unhas, mulai dari Ombak, Riman, Andry, Dhani, Suci, Dela, Rere, Rasma, Riris, dan Ririn.

13. Terima kasih untuk saudara — saudari seperjuangan sejak menyandang status mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas. Saudaraku Zeitgeist 2019, Mulai dari Andes selaku ketua angkatan, Adam, Hafiqi, Zaky, Edli, Ilham, Viko, Firga, Ibnu, Eki, Wahyu, Ramlan, Rafli, Acos, Fajri, Ila, Inna, Aldi, Indah a, Lala, Lili, Lulu, Nunu, Puput, Stevy, Venike, Pute, Nisa, dan Kika. Terima kasih atas segala kisah suka duka yang kita lalui bersama dan semoga itu abadi dikenangan kita semua.

14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem)

FISIP Unhas, yang telah menyertai kehidupan kemahasiswaan penulis, menjadi rumah tempat dimana ada banyak suka dan duka, memberikan banyak proses mendewasakan diri. Terima kasih atas segala cerita dan ilmu serta kesempatan berperan sebagai kakak yang berbagi maupun sebagai adik yang dibimbing. Terima kasih atas kebersamaannya, kesempatan berkarya, kekeluargaan yang telah diberikan.

Makassar, 14 Februari 2023

Amirul Muk'min

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Peran Pemerintah Daerah	11
2.1.1 Peran.....	11
2.1.2 Pemerintah Daerah	12
2.1.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM	16
2.3 Konsep UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).....	18

2.3.1	Definsi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).....	18
2.3.2	Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	19
2.3.3	Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	20
2.4	Konsep Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	22
2.4.1	Tujuan Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	24
2.5	Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
3.2	Lokasi Penelitian.....	27
3.3	Fokus Penelitian	28
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4.1	Sumber Data	29
3.5	Teknik analisis data	30
3.6	Informan.....	32
BAB IV		34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang	34

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.....	46
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Peternakan Dan Perikanan	67
4.1.4 Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	73
4.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM Sektor Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang	80
4.2.1 Peran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Pengembangan UMKM Di Kabupaten Sidenreng Rappang ..	82
4.2.2 Peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Dalam Pengembangan UMKM sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	87
4.2.3 Peran Dinas Peternakan dan Perikanan Dalam Pengembangan UMKM Sektor Peternakan Di Kabupaten Sidenreng Rappang	93
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM	100
4.3.1 Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan UMKM Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang	100
4.3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan UMKM Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang	103
BAB V	111

PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN - LAMPIRAN	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif	31
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi.....	66
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan	72
Gambar 4. 3	Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Sektor Pertanian dan Peternakan Pada tahun 2020, 2021, dan 2022.	5
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kab. Sidenreng Rappang.....	42
Tabel 4. 2 Daftar – daftar umkm pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	92
Tabel 4. 3 Daftar – daftar umkm peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022	98

ABSTRAK

AMIRUL MUK'MIN, Nomor Induk Mahasiswa E051191025, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Sektor Pertanian Dan Peternakan Di Kabupaten Sidenreng Rappang” , dibawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan umkm pertanian dan peternakan di kabupaten Sidrenreng Rappang beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan umkm pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidrap.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan juga fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penggambaran terkait pengembangan umkm pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidrap baik itu dari segi faktor pendukungnya dan juga faktor penghambatnya.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan umkm pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidrap belum seluruhnya optimal dijalankan. Pelatihan – pelatihan dan bantuan yang di berikan kepada pelaku umkm belum maksimal. Faktor penghambat pengembangan umkm pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidrap yaitu, keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya secara tidak langsung mempengaruhi keterbatasan informasi dan memacu rendahnya kreativitas, kurangnya pengembangan pengetahuan teknologi kepada pelaku umkm sehingga kegiatan produksi dan pemasaran belum maksimal, dan bantuan modal yang belum maksimal di berikan kepada umkm pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidrap, Sedangkan faktor pendukung adalah kemitraan yang di lakukan oleh umkm dengan lembaga – lembaga untuk mendapatkan bantuan dan pemberdayaan melalui pelatihan – pelatihan yang di berikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap.

Kata Kunci : Pengembangan, Pelatihan, Pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten

ABSTRACT

AMIRUL MUK'MIN, Student Identification Number E051191025, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis with the title: "The Role of Local Government in the Development of Agricultural and Livestock Sector UMKM in Sidenreng Rappang Regency", under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.

This study aims to determine how the role of local government in the development of agricultural and livestock umkm in Sidrenreng Rappang district and what factors affect the development of agricultural and livestock umkm in Sidrap Regency.

The type of research used is descriptive qualitative type, which is intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, by describing data and facts relating to the problems and units under study. This research aims to provide a description of the development of agricultural and livestock umkm in Sidrap Regency both in terms of supporting factors and inhibiting factors.

The results of this study illustrate that the role of the government in the development of agricultural and livestock umkm in Sidrap Regency is not entirely optimal. Training - training and assistance provided to umkm actors has not been maximized. The inhibiting factors inhibiting the development of agricultural and livestock umkm in Sidrap Regency are, the limitations of small business human resources both in terms of formal education and knowledge and skills indirectly affect the limitations of information and spur low creativity, the lack of development of technological knowledge to umkm actors so that production and marketing activities have not been maximized, and capital assistance that has not been maximized given to agricultural and livestock umkm in Sidrap Regency, While supporting factors are partnerships made by umkm with institutions to get assistance and empowerment through training provided by the Sidrap Regency local government.

Keywords: Development, Training, Empowerment, District Government

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu usaha untuk meningkatkan serta memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat maupun bangsa dan negara yang sekaligus merupakan sebuah proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan nasional mencerminkan kehendak untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta dapat mengembangkan kehidupan masyarakat yang maju, demokratis berdasarkan Pancasila (Yorisca, 2020). Pembangunan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan pembangunan dari segi perekonomian yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Indikasi tercapainya suatu pembangunan ekonomi yaitu dari peningkatan segi perekonomian, kesempatan kerja yang luas, minimnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dapat diwujudkan melalui sektor UMKM.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM juga akan berdampak positif pada peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah penduduk miskin, pemerataan pendapatan dan pembangunan ekonomi.

Dengan adanya Usaha Kecil, Menengah dan Kecil (UMKM). Perekonomian nasional mengalami pertumbuhan yang begitu besar dan UMKM merupakan salah satu indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian dan UMKM juga merupakan sektor perekonomian nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, UMKM dijadikan tulang punggung perekonomian nasional. Peranan UMKM yang paling terlihat adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, karena karakteristik tenaga kerja di sektor tersebut tidak membutuhkan banyak kondisi seperti perusahaan besar. Pada akhirnya sektor UMKM memiliki keunggulan kompetitif akan mampu memasuki pasar global.

UMKM dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sektor yaitu, sektor pertanian, peternakan, dan usaha kreatif. Dalam sektor peternakan UMKM dapat berupa peternakan Bebek Petelur, pengembang biakan ikan lele, dan peternakan ayam. Sektor pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan, serta kesejahteraan rakyat. UMKM mampu menyerap tenaga kerja 96,99% dari seluruh tenaga kerja dan sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar, yaitu 57,56 % (Kementerian Koperasi dan UKM 2007). Dengan demikian, UMKM dapat menjadi salah satu

alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan di masa depan.

Namun demikian, pengembangan UMKM berbasis pertanian pangan masih menghadapi banyak permasalahan, baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi mulai dari hulu sampai hilir yang meliputi penyediaan bahan baku, proses produksi dan teknologi, keuangan, pemasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penciptaan nilai tambah. Permasalahan eksternal terkait dengan kemampuan UMKM untuk bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional semakin kompleks.

UMKM mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik dalam penyerapan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi kemiskinan, memberikan kontribusi terbesar pada PDB, dan menghemat devisa dari ekspor produk UMKM. Namun demikian UMKM di Indonesia belum dapat berkembang secara optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal antara lain kecilnya modal, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan usaha, belum berbadan hukum, dan rendahnya akuntabilitas yang menggambarkan belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat perkembangan UMKM adalah iklim usaha, infrastruktur dan akses bahan baku, akses teknologi, serta akses pasar.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan Renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sidrap menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pembinaan kepada masyarakat tentang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya, pelaksanaan bimbingan teknis bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Menurut data Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap jumlah UMKM pada tahun 2020 yaitu 43 UMKM, pada tahun 2021 yaitu 126 UMKM, dan pada tahun 2022 yaitu 216 UMKM. Menurut data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk jumlah UMKM sektor pertanian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 jumlahnya tetap, yaitu 10 UMKM. Kemudian data Dinas Peternakan dan Perikanan untuk jumlah UMKM sektor peternakan pada tahun 2020 yaitu 10 UMKM, pada tahun 2021 yaitu 14 UMKM, dan pada tahun 2022 yaitu 12 UMKM.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Sektor Pertanian dan Peternakan Pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

Sektor UMKM	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pertanian	10	10	10
Peternakan	10	14	12

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pemerintah memiliki peran strategis di tengah masyarakat yaitu peran sebagai pelayan, peran sebagai pembangunan, peran sebagai pemberdayaan masyarakat, dan peran sebagai stabilisator. Salah satu hal yang paling mendasar di tengah perkembangan zaman adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Dalam

mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsi, dimana pemerintah mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain (Sufianto, 2016). Pengembangan UMKM perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang secara lebih kompetitif. Kebijakan pemerintah perlu diupayakan agar lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya (Wuryandai, 2013).

Peran pemerintah ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup dalam peraktek Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi ini

secara yuridis melalui upaya diatas secara garis besar menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan pemberdayaan UMKM, pemerintah tentunya memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam realitasnya, terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi sejumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memaksimalkan pemberdayaan UMKM untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemandirian. Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri jumlah UMKM cukup banyak yang belum disentuh, permasalahan yang timbul lainnya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman UMKM, masih rendahnya daya saing produk UMKM, masih rendahnya kualitas SDM UMKM, kurang optimalnya pengembangan UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kurang optimalnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap UMKM dan masyarakat dapat dilihat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha.

Beberapa masalah-masalah yang diidentifikasi UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kuatnya sektor industry dalam rantai pasok. Di Sulawesi Selatan, posisi industri memiliki kekuatan bargaining yang lebih besar dari petani sebagai pemasok. Namun masalah yang paling mendasar yaitu kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya juga kurangnya daya saing antar pelaku usaha terhadap produk yang ada baik di Kabupaten Sidenreng Rappang itu sendiri maupun di luar daerah. Hal ini salah satunya dipicu oleh kualitas produk, juga ketersediaan produksi yang relative sedikit dibanding dengan pembeli. Selain itu, kondisi politik lokal yang relatif berubah setiap kali pergantian kepemimpinan daerah menyebabkan program-program yang bersifat jangka panjang sulit dijamin keberlanjutannya termasuk dalam upaya pemerintah terhadap pemberdayaan pelaku usaha. Untuk itu, maka diperlukan komitmen yang kuat untuk terus melakukan program kerja jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti merasa perlu dan penting dalam melakukan penelitian terhadap **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Sektor Pertanian dan Peternakan Di Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa kendala dalam pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman UMKM, daya saing produk UMKM yang tinggi, kualitas SDM UMKM yang masih belum baik, dan kurang optimalnya

pengembangan UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun rumusan masalah yang peneliti akan teliti yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM

sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan juga bisa dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya terutama yang berkaitan peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan UMKM sektor pertanian dan peternakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Peran

Menurut Soekanto (2014), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Lanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu : 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat (Soekanto 2014). Menurut Ife dan Tesoriero (2008)

Peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Menurut Ife dan Tesoriero (2008) Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan , yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis.

Scott dkk. Dalam Kanfer (1987), dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

- 1) Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
- 2) Peran terkait dengan perilaku kinerja (*task behavior*), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
- 3) Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- 4) Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
- 5) Peran non-kerja (*jobs*) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda (Kanfer, 1987).

2.1.2 Pemerintah Daerah

Menurut Faried (2012) Pemerintah atau Government dalam bahas inggris diartikan sebagai: "*The authoritative direction and administration of the affairs of man/woman in nation, state, city, etc*" yang berarti pengarahan

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota sebagainya. Menurut Amrusi dalam Huda (2019). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Menurut Tjandra (2009) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Tjokroamidjojo (1919) dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai

berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun ada pula nagara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1) Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2) Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan

masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.1.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM

Diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan

usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadidua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing.

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Gede Diva, 2009: 15).

2.3 Konsep UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

2.3.1 Definsi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Menurut Komarudin (2014) Konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; ketiga, usaha yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.

Menurut Wilantara dan Susilawati (2016) Dalam bukunya Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), mengemukakan bahwa Definisi dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.3.2 Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Peran UMKM dalam masalah pertumbuhan ekonomi bangsa sudah tidak diragukan lagi, penyerapan terhadap tenaga kerja dan produk domestik bruto yang meningkat tiap tahunnya adalah bukti nyata bahwa UMKM menjadi primadona ekonomi Indonesia. Berikut secara rinci bagaimana peran penting UMKM terhadap perekonomian Indonesia menurut Bank Indonesia (2015):

1. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan pendapatan masyarakat sehingga mendorong perekonomian rakyat dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.
2. Pada krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008 terbukti 96% UMKM bertahan dari guncangan krisis ekonomi pada saat itu.

3. UMKM sangat membantu pemerintah dalam masalah penyerapan tenaga kerja melalui usaha – usaha baru yang diciptakan melalui UMKM yang tentunya dapat membantu pendapatan rumah tangga.
4. UMKM mempunyai fleksibilitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu jaringan bisnis yang kuat sesama pengusaha UMKM agar tercipta iklim bisnis yang sehat dan terarah, tentunya dengan bantuan pemerintah.
5. Perkembangan UMKM di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan ekonomi Indonesia seperti pengangguran, kemiskinan, dan urbanisasi.

2.3.3 Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah menurut Wilantara dan Susilawati (2016) kriteria Usaha Mikro adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil, kriterianya sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah, kriterianya sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sementara itu Tulus Tambunan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting) Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri.

2.4 Konsep Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, seperti berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan Pemerintah Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga keuangan mikro bank antara lain, BRI unit desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai saat ini BRI memiliki sekitar 4.000 unit tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit melayani UMKM. Untuk itu perlu mendorong perkembangan LKM, yang harus dilakukan saat ini adalah mendorong bagaimana pengembangan LKM ini berjalan

dengan baik, karena selama ini LKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

3. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha tertentu Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara pada saling menguntungkan (win-win solution).
4. Pengembangan Kemitraan Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antar UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar baik didalam negeri maupun luar negeri, menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Pelatihan Pemerintah Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
6. Membentuk Lembaga Khusus Membentuk lembaga khusus perlu

dibangun suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

2.4.1 Tujuan Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Program Pengembangan UMKM melayani pengembangan keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program ini melatih para peserta untuk: menerapkan ketrampilan kewirausahaan mereka, mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak atau memperluas usaha yang ada, dan secara hati-hati mempersiapkan proposal perencanaan bisnis untuk di presentasikan ke lembaga-lembaga keuangan. Tujuan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi sistem usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan(Hasri, Santoso, & TH, 2014).

2.5 Kerangka Pikir

